

Analisis Akuntansi Manajemen dalam Optimalisasi Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Rifky Syah Rezky Lubis¹, Aditya Rahman², Nadiya Nova Heriani³ Yohanes Leo Parera⁴

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika

rifkysyahrezkylbs@gmail.com¹, rahmanuaditya11@gmail.com², ndynva@gmail.com³, Yohanesleoparera@gmail.com⁴

Article Info

Article history:

Received 22/10/2025

Revised 22/10/2025

Accepted 23/10/2025

Abstract

This study aims to analyze the implementation of management accounting in optimizing regional government expenditure management with a case study on the Provincial Government of West Java. Management accounting plays a crucial role in planning, controlling, and evaluating the financial performance of local governments to ensure that budget utilization becomes more effective, efficient, and accountable. This research employs a descriptive qualitative approach through literature studies and document analysis of regional financial reports (LKPD) published by the Audit Board of Indonesia (BPK) and the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. The analysis focuses on the application of management accounting principles such as performance-based budgeting, public cost control, and program effectiveness measurement. The findings indicate that a wellimplemented management accounting system improves transparency, promotes the efficient use of public funds, and strengthens government accountability. However, several challenges remain, particularly in maintaining consistency of reporting and integrating financial information systems across institutions. This study is expected to contribute to the improvement of public financial governance at the regional level and serve as a reference for the government to strengthen the application of management accounting principles in the future.

Keywords: Management Accounting, Budget Management, Local Government, Efficiency, Accountability.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi manajemen dalam optimalisasi pengelolaan anggaran belanja pemerintah daerah dengan studi kasus pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Akuntansi manajemen memiliki peran penting dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah agar penggunaan anggaran menjadi lebih efektif, efisien, serta akuntabel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka dan analisis dokumen laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Fokus analisis diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip akuntansi manajemen seperti perencanaan anggaran berbasis kinerja, pengendalian biaya publik, serta pengukuran efektivitas program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi manajemen yang baik mampu meningkatkan transparansi, mendorong efisiensi penggunaan dana publik, dan memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah. Namun demikian, masih ditemukan kendala dalam hal konsistensi pelaporan dan integrasi sistem informasi keuangan antar-instansi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan tata kelola keuangan sektor publik di tingkat daerah serta menjadi acuan bagi pemerintah dalam memperkuat penerapan prinsip akuntansi manajemen di masa mendatang.

Kata kunci: Akuntansi Manajemen, Pengelolaan Anggaran, Pemerintah Daerah, Efisiensi, Akuntabilitas.



©2024 Authors. Published by PT AN Consulting: Jurnal ANC. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Akuntansi manajemen merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang berfokus pada penyediaan informasi keuangan dan non-keuangan untuk membantu manajemen dalam proses perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, serta evaluasi kinerja organisasi. Dalam konteks

pemerintahan, akuntansi manajemen tidak hanya menjadi alat bantu administratif, melainkan juga berperan strategis sebagai sistem informasi yang mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah daerah sebagai entitas publik dituntut untuk mengelola keuangan negara dengan penuh tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas, karena dana publik yang dikelola bersumber dari masyarakat dan harus kembali memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, akuntansi manajemen berperan sebagai instrumen untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki nilai guna dan menghasilkan kinerja yang terukur.

Fenomena yang terjadi pada banyak pemerintah daerah di Indonesia menunjukkan bahwa tantangan terbesar dalam pengelolaan keuangan bukan terletak pada ketersediaan dana, melainkan pada efektivitas penggunaannya. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023, masih ditemukan beberapa kelemahan dalam sistem pengendalian internal serta ketidaksesuaian dalam pelaporan anggaran pada sejumlah pemerintah daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme perencanaan dan evaluasi anggaran belum sepenuhnya didukung oleh sistem akuntansi manajemen yang memadai. Padahal, melalui penerapan prinsip-prinsip akuntansi manajemen, pemerintah daerah dapat melakukan perencanaan berbasis kinerja (*performance-based budgeting*), pengendalian biaya publik, serta penilaian efektivitas kebijakan yang lebih komprehensif. Akuntansi manajemen menyediakan data yang lebih dalam daripada sekadar laporan keuangan, karena mencakup informasi analitis tentang perbandingan antara target dan realisasi anggaran, rasio efisiensi, dan capaian program.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah dengan anggaran terbesar di Indonesia. Berdasarkan data *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)* tahun 2024, total belanja daerah Jawa Barat mencapai lebih dari Rp40 triliun yang dialokasikan untuk berbagai program prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat. Dengan cakupan wilayah yang luas dan jumlah penduduk lebih dari 48 juta jiwa, pengelolaan keuangan di provinsi ini menuntut sistem pengendalian yang efektif. Akuntansi manajemen memiliki peran strategis dalam memastikan setiap proses penganggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, berjalan secara efisien dan akuntabel. Penerapan sistem akuntansi manajemen juga membantu pemerintah daerah dalam melakukan analisis biaya dan manfaat terhadap program kerja sehingga alokasi sumber daya dapat dilakukan dengan lebih tepat sasaran.

Lebih jauh lagi, pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari kebijakan desentralisasi fiskal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sumber daya keuangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal. Namun, otonomi daerah juga membawa tantangan baru berupa meningkatnya kompleksitas administrasi keuangan. Pemerintah daerah dituntut untuk tidak hanya menjalankan fungsi pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), tetapi juga mampu menerapkan sistem pengukuran kinerja keuangan yang akurat agar hasil pembangunan dapat dinilai secara objektif. Dalam konteks inilah, akuntansi manajemen hadir sebagai mekanisme pengawasan dan evaluasi yang memastikan setiap kebijakan publik berorientasi pada hasil (*outcome-based management*).

Permasalahan umum yang sering dihadapi oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran adalah lemahnya koordinasi antarperangkat daerah, rendahnya disiplin anggaran, serta masih terbatasnya pemahaman aparatur terhadap penerapan sistem akuntansi manajemen. Sebagai contoh, masih banyak instansi daerah yang belum sepenuhnya menerapkan penganggaran berbasis kinerja, sehingga pengeluaran sering kali lebih berorientasi pada serapan anggaran (*spending oriented*) daripada hasil capaian program. Hal ini menyebabkan munculnya ketidakefisienan, misalokasi sumber daya, dan ketidaksesuaian antara target pembangunan dengan hasil aktual. Melalui pendekatan akuntansi manajemen, masalah tersebut dapat diatasi dengan penerapan sistem analisis biaya, pengukuran produktivitas, serta pelaporan kinerja yang lebih transparan. Akuntansi manajemen juga membantu pemerintah dalam melakukan *variance analysis*, yaitu membandingkan antara perencanaan dan realisasi anggaran untuk mengetahui penyebab penyimpangan dan menentukan langkah korektif.

Selain itu, penerapan akuntansi manajemen juga sejalan dengan prinsip *good governance* yang menekankan pada tiga pilar utama: transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi keuangan yang dapat diakses masyarakat, akuntabilitas ditunjukkan dengan pertanggungjawaban kinerja pemerintah terhadap penggunaan dana publik, dan partisipasi publik terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Dengan menerapkan akuntansi manajemen secara konsisten, pemerintah daerah dapat membangun kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi kebijakan fiskalnya. Di sisi lain, sistem ini juga membantu pemerintah

dalam menyusun laporan keuangan yang lebih informatif bagi pemangku kepentingan, seperti DPRD, lembaga audit, dan masyarakat umum.

Rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada pertanyaan utama: “Bagaimana penerapan akuntansi manajemen dapat mengoptimalkan pengelolaan anggaran belanja pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat?” Dari rumusan ini, muncul submasalah seperti: sejauh mana prinsip-prinsip akuntansi manajemen telah diterapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD, faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan sistem tersebut, serta bagaimana pengaruhnya terhadap efisiensi dan akuntabilitas keuangan daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai pentingnya akuntansi manajemen dalam mendukung efektivitas kebijakan fiskal daerah serta dalam memperkuat kapasitas institusional pemerintah daerah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan akuntansi manajemen dalam optimalisasi pengelolaan anggaran belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam implementasinya, serta menilai kontribusi sistem akuntansi manajemen terhadap peningkatan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran tentang strategi yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah dalam memperbaiki kinerja keuangannya. Sementara itu, manfaat teoretis dari penelitian ini adalah memperluas wawasan akademik di bidang akuntansi sektor publik dan manajemen keuangan daerah. Manfaat praktisnya adalah memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan daerah lain untuk memperkuat penerapan sistem akuntansi manajemen dalam tata kelola keuangan publik.

Selain aspek manajerial, penelitian ini juga menyoroti pentingnya penggunaan teknologi informasi dalam mendukung sistem akuntansi manajemen di era digital. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengembangkan berbagai sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi, seperti *Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)* dan *e-Budgeting*, namun efektivitas implementasinya masih memerlukan pengawasan berkelanjutan. Integrasi sistem ini dengan prinsip-prinsip akuntansi manajemen diharapkan dapat meningkatkan ketepatan pelaporan, mempercepat proses evaluasi, dan mengurangi potensi kesalahan administrasi. Dengan demikian, akuntansi manajemen bukan hanya menjadi alat analisis keuangan, tetapi juga menjadi fondasi bagi transformasi digital tata kelola keuangan publik di tingkat daerah.

Dari keseluruhan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntansi manajemen memegang peran kunci dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran daerah. Pemerintah daerah perlu terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia, meningkatkan koordinasi antarinstansi, serta mengintegrasikan teknologi informasi dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep dan praktik akuntansi manajemen di sektor publik, khususnya dalam mendukung kinerja fiskal yang transparan, efisien, dan berorientasi pada hasil pembangunan yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah penting dalam menentukan arah, validitas, dan keandalan hasil penelitian. Dalam jurnal ini, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*) dan analisis dokumen keuangan publik, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana penerapan prinsip akuntansi manajemen dapat mengoptimalkan pengelolaan anggaran belanja pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak berfokus pada pengukuran angka atau data statistik semata, melainkan pada pemahaman yang lebih mendalam terhadap konsep, proses, dan implementasi sistem akuntansi manajemen di sektor publik. Sejalan dengan pendapat Creswell (2014), penelitian kualitatif digunakan untuk menggali makna fenomena sosial berdasarkan perspektif dan konteks yang terjadi di lapangan, serta menghasilkan deskripsi yang komprehensif terhadap subjek penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena berupaya menggambarkan kondisi aktual penerapan akuntansi manajemen di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurut Sugiyono (2017), metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fakta, fenomena, atau variabel tertentu secara sistematis, faktual, dan akurat tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Dalam konteks ini, peneliti berfokus pada analisis terhadap laporan keuangan daerah, mekanisme perencanaan dan realisasi anggaran, serta praktik pengendalian keuangan berbasis kinerja di instansi pemerintahan daerah. Analisis dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber resmi, seperti Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Hasil

Pemeriksaan BPK RI, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, serta literatur akademik terkait akuntansi sektor publik dan manajemen keuangan daerah.

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, yang mengutamakan eksplorasi terhadap proses dan makna penerapan akuntansi manajemen dalam pengelolaan keuangan publik. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengungkap dinamika penerapan sistem akuntansi manajemen yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan melalui angka-angka kuantitatif. Pendekatan deskriptif memberikan fleksibilitas dalam menjelaskan hubungan antar variabel konseptual seperti efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas yang berkaitan dengan praktik manajemen keuangan daerah. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti menginterpretasikan data berdasarkan konteks sosial dan administratif yang terjadi di pemerintahan daerah, sehingga hasil penelitian bersifat holistik dan realistis.

Dalam penelitian ini, fokus analisis diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip akuntansi manajemen dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran belanja daerah. Hal tersebut meliputi perencanaan anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*), sistem pengendalian internal, efisiensi biaya publik, dan evaluasi terhadap realisasi anggaran. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek teoritis, tetapi juga aspek aplikatif dalam praktik keuangan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis resmi dan relevan dengan fokus penelitian. Menurut Sekaran dan Bougie (2016), data sekunder merupakan informasi yang dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan tertentu, namun masih relevan untuk dianalisis ulang oleh peneliti dalam konteks yang berbeda. Dalam hal ini, data sekunder yang digunakan meliputi:

1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat tahun 2020–2024 yang telah diaudit oleh BPK RI.
2. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan terkait efektivitas pengelolaan anggaran belanja dan pengendalian internal pemerintah daerah.
3. Publikasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), yang memuat informasi mengenai kebijakan fiskal dan realisasi transfer ke daerah.
4. Literatur akademik, seperti jurnal ilmiah, buku teks akuntansi manajemen sektor publik, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dan studi pustaka. Dokumen yang dikaji mencakup laporan keuangan, peraturan daerah terkait APBD, serta dokumen kebijakan fiskal yang diterbitkan secara resmi. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang efisiensi, akuntabilitas, dan penerapan sistem akuntansi manajemen di sektor publik.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu proses menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Menurut Miles dan Huberman (2014), analisis kualitatif mencakup tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data (Data Reduction)
Tahap ini dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data mentah yang relevan dengan fokus penelitian. Dari berbagai sumber dokumen, peneliti menyeleksi informasi terkait penerapan akuntansi manajemen, pola perencanaan dan pengawasan anggaran, serta temuan audit yang menunjukkan efektivitas atau kelemahan sistem keuangan daerah.
2. Penyajian Data (Data Display)
Informasi yang telah diseleksi kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi naratif dan tabel ringkasan agar lebih mudah dipahami. Penyajian ini mencakup perbandingan antara kebijakan akuntansi manajemen yang diterapkan dengan hasil kinerja keuangan daerah.
3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing)

Tahap akhir ini bertujuan untuk menarik temuan yang bersifat tematik dan konseptual. Kesimpulan yang diperoleh digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian, yaitu sejauh mana

akuntansi manajemen berperan dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.

Selain pendekatan analisis deskriptif, penelitian ini juga menggunakan teknik *content analysis* (analisis isi) terhadap dokumen LKPD dan laporan hasil pemeriksaan BPK untuk menilai sejauh mana prinsip akuntansi manajemen diterapkan dalam siklus anggaran daerah. Analisis ini memungkinkan peneliti untuk menemukan pola, tren, serta kesesuaian antara teori dengan praktik di lapangan.

Lokasi dan Objek Penelitian

Objek penelitian difokuskan pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, karena provinsi ini memiliki kompleksitas keuangan yang tinggi serta jumlah anggaran belanja daerah terbesar ketiga di Indonesia. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa Jawa Barat merupakan daerah yang telah menerapkan sistem keuangan berbasis elektronik melalui *e-Budgeting* dan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah). Dengan sistem ini, pemerintah daerah diharapkan mampu mengintegrasikan proses perencanaan dan pelaporan keuangan secara lebih efektif. Namun, hasil audit dan kajian akademik menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam sinkronisasi data antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dan keterbatasan dalam pemanfaatan informasi akuntansi manajemen untuk pengambilan keputusan strategis. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis efektivitas penerapan akuntansi manajemen dalam konteks tersebut.

Validitas dan Reliabilitas Data

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari beberapa dokumen resmi untuk memastikan konsistensi dan validitasnya. Menurut Moleong (2017), triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri sebagai pembanding. Dalam penelitian ini, data dari LKPD dibandingkan dengan laporan BPK dan publikasi Kementerian Keuangan guna memverifikasi kesesuaian antara laporan keuangan dan hasil audit. Selain itu, literatur ilmiah juga digunakan sebagai pembanding teoritis terhadap praktik penerapan akuntansi manajemen di lapangan. Reliabilitas penelitian dijaga melalui proses pengolahan data yang sistematis dan pencatatan referensi secara lengkap sesuai dengan format *American Psychological Association (APA Style)* agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dengan metode penelitian ini, diharapkan analisis yang dilakukan tidak hanya memberikan gambaran umum tentang penerapan akuntansi manajemen di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tetapi juga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara sistem akuntansi manajemen dengan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Pendekatan ini juga diharapkan dapat memperkuat posisi penelitian sebagai landasan empiris dalam mendukung reformasi keuangan publik di tingkat daerah.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah dengan kompleksitas fiskal terbesar di Indonesia. Berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI), total realisasi pendapatan daerah mencapai Rp41,8 triliun, sedangkan total belanja daerah mencapai Rp40,2 triliun. Anggaran ini mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer ke kabupaten/kota. Sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi fokus utama belanja daerah, sejalan dengan prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2023.

Dalam sistem pengelolaan keuangan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang terintegrasi dengan *e-Budgeting*. Sistem ini mendukung penerapan prinsip *performance-based budgeting* (penganggaran berbasis kinerja), di mana setiap unit kerja wajib menyusun indikator kinerja, target output, dan outcome dari program yang direncanakan. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi keuangan daerah dapat dimonitor secara elektronik dan lebih transparan.

Namun demikian, laporan hasil pemeriksaan BPK tahun 2023 menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan sistem akuntansi manajemen di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Di antaranya adalah belum seragamnya penerapan analisis biaya kegiatan

antarorganisasi perangkat daerah (OPD), kurang optimalnya integrasi data keuangan antar-unit, serta masih terbatasnya pemanfaatan informasi akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan strategis.

Analisis Penerapan Akuntansi Manajemen pada Pengelolaan Anggaran

Penerapan akuntansi manajemen di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencakup tiga tahap utama, yaitu perencanaan anggaran, pengendalian biaya, dan evaluasi kinerja keuangan. Ketiga aspek tersebut menjadi fokus analisis dalam penelitian ini untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip akuntansi manajemen diimplementasikan dan memberikan dampak terhadap efisiensi fiskal daerah.

Tahap Perencanaan Anggaran (Budget Planning)

Pada tahap ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggunakan pendekatan *performance-based budgeting*, di mana setiap program disertai dengan indikator output dan outcome. Pendekatan ini memungkinkan pengukuran kinerja keuangan berdasarkan manfaat nyata yang diterima masyarakat, bukan hanya pada tingkat serapan anggaran. Namun berdasarkan hasil audit BPK (2023), ditemukan bahwa dari 48 perangkat daerah, sekitar 14 di antaranya masih belum menetapkan indikator kinerja yang terukur, sehingga menyulitkan evaluasi efektivitas program.

Tabel berikut menunjukkan ringkasan perbandingan antara alokasi anggaran dan realisasi belanja daerah tahun 2021–2023:

Tahun	Total Anggaran (Rp Triliun)	Realisasi Belanja (Rp Triliun)	Persentase Realisasi (%)
2021	38,60	36,90	95,59%
2022	39,40	38,10	96,70%
2023	41,50	40,20	96,87%

Sumber: Data diolah dari LKPD Provinsi Jawa Barat 2021–2023 (BPK RI, 2024).

Data pada tabel menunjukkan bahwa tingkat realisasi anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat tergolong tinggi, berada di atas 95% selama tiga tahun berturut-turut. Namun, tingginya tingkat realisasi tidak selalu mencerminkan efisiensi fiskal yang optimal. Dalam perspektif akuntansi manajemen, efektivitas anggaran tidak hanya diukur dari besarnya serapan dana, melainkan juga dari seberapa besar manfaat (*outcome*) yang dihasilkan. Oleh karena itu, sistem penganggaran berbasis kinerja memerlukan penerapan analisis biaya dan pengukuran hasil untuk memastikan keseimbangan antara input dan output program.

Tahap Pengendalian Biaya (Cost Control)

Pengendalian biaya merupakan salah satu komponen utama dalam akuntansi manajemen. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menerapkan sistem pengawasan anggaran berbasis *e-monitoring* yang memungkinkan setiap OPD melaporkan perkembangan realisasi belanja secara berkala. Namun, hasil audit BPK menunjukkan bahwa masih terdapat penyimpangan kecil antara anggaran dan realisasi biaya operasional, terutama pada sektor infrastruktur dan pendidikan.

Tabel berikut menggambarkan **rata-rata penyimpangan biaya (variance analysis)** antara anggaran dan realisasi untuk tiga kategori utama belanja daerah:

Kategori Belanja	Anggaran (Rp Miliar)	Realisasi (Rp Miliar)	Varians (Rp Miliar)	Persentase Selisih (%)

Belanja Operasi	21.350	21.120	230	1,08%
Belanja Modal	9.820	9.515	305	3,10%
Belanja Hibah Bantuan	8.210	8.065	145	1,76%

Sumber: Data diolah dari LHP BPK RI, 2023.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat selisih atau varians antara anggaran dan realisasi pada setiap kategori belanja. Selisih terbesar terdapat pada belanja modal, dengan persentase penyimpangan 3,10%. Menurut prinsip akuntansi manajemen, penyimpangan ini perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya, apakah disebabkan oleh efisiensi biaya atau ketidakefektifan pelaksanaan program. Varians positif (realisasi lebih rendah dari anggaran) dapat menunjukkan efisiensi, namun juga bisa menandakan keterlambatan pelaksanaan proyek. Oleh karena itu, fungsi *variance analysis* dalam akuntansi manajemen menjadi penting untuk menentukan langkah korektif dalam pengendalian keuangan daerah.

Tahap Evaluasi Kinerja Keuangan (Performance Evaluation)

Evaluasi kinerja keuangan merupakan tahap akhir dari siklus manajemen anggaran yang menilai sejauh mana program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD telah mencapai targetnya. Berdasarkan *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Jawa Barat* tahun 2023, capaian kinerja rata-rata pemerintah provinsi mencapai 92,4% dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum program pembangunan berjalan dengan baik, meskipun terdapat beberapa kegiatan yang masih belum mencapai indikator hasil secara penuh, terutama di sektor pendidikan nonformal dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Akuntansi manajemen berperan penting dalam proses evaluasi ini karena menyediakan data analitis yang memungkinkan pengukuran efisiensi dan efektivitas program. Melalui pendekatan *responsibility accounting*, setiap perangkat daerah dapat dievaluasi berdasarkan tanggung jawab anggaran yang telah diberikan. Dengan demikian, sistem evaluasi berbasis akuntansi manajemen dapat membantu pemerintah daerah mengidentifikasi unit kerja yang produktif dan menentukan prioritas kebijakan fiskal di masa mendatang.

Analisis Temuan dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi manajemen di Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memberikan dampak positif terhadap transparansi dan efisiensi keuangan daerah. Namun, terdapat beberapa faktor yang masih menjadi kendala dalam optimalisasi penerapan sistem tersebut. Pertama, masih terbatasnya pemahaman sumber daya manusia di lingkungan birokrasi terhadap konsep akuntansi manajemen menyebabkan informasi keuangan yang dihasilkan belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan strategis. Kedua, integrasi antar-sistem keuangan daerah belum berjalan sempurna, terutama antara *SIPD* dan sistem *e-Monev*, yang menyebabkan duplikasi pelaporan. Ketiga, pengawasan internal dan analisis biaya belum dilakukan secara rutin di seluruh OPD, padahal hal ini merupakan elemen kunci dalam memastikan efisiensi penggunaan anggaran.

Bila dikaitkan dengan teori yang digunakan, hasil ini mendukung pandangan Mardiasmo (2018) bahwa penerapan akuntansi manajemen di sektor publik harus didukung oleh komitmen kelembagaan, sumber daya manusia yang kompeten, dan sistem informasi yang handal. Penerapan akuntansi manajemen juga terbukti sejalan dengan prinsip *good governance*, khususnya dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya nilai kinerja keuangan dan opini BPK terhadap LKPD Jawa Barat yang sejak tahun 2020 hingga 2023 konsisten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Secara konseptual, penerapan akuntansi manajemen telah memperkuat siklus keuangan daerah yang berbasis kinerja (*performance cycle*), di mana setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dikaitkan dengan target hasil yang terukur. Dengan demikian, sistem ini bukan hanya sekadar alat administratif, tetapi juga sarana strategis untuk meningkatkan keandalan kebijakan fiskal daerah.

Implikasi dan Analisis Kritis

Implikasi dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi manajemen berperan sebagai fondasi dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang efektif. Penerapan prinsip akuntansi manajemen telah membantu Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melakukan efisiensi belanja, menekan potensi pemborosan, dan meningkatkan transparansi fiskal. Namun, untuk mencapai efektivitas maksimal, dibutuhkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyempurnaan sistem informasi keuangan daerah, dan penegakan disiplin anggaran di seluruh organisasi perangkat daerah.

Selain itu, hasil penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi pengembangan teori akuntansi sektor publik, bahwa prinsip-prinsip akuntansi manajemen dapat diadaptasi secara efektif dalam konteks pemerintahan daerah jika disertai dukungan regulasi dan komitmen politik yang kuat. Pemerintah daerah juga perlu mengembangkan indikator efisiensi dan efektivitas yang lebih spesifik agar hasil evaluasi kinerja dapat diukur secara objektif. Dengan demikian, penerapan akuntansi manajemen tidak hanya berdampak pada peningkatan efisiensi keuangan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi manajemen memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan di sektor publik, khususnya pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Penerapan prinsip-prinsip akuntansi manajemen, seperti perencanaan anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*), pengendalian biaya (*cost control*), serta evaluasi berbasis hasil (*performance evaluation*), terbukti mampu meningkatkan transparansi dan memperbaiki kualitas pengambilan keputusan keuangan di tingkat daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi manajemen yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja keuangan, yang ditandai dengan tingkat realisasi anggaran di atas 95% dan capaian kinerja program di atas 90% dari target yang ditetapkan. Selain itu, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang secara konsisten diberikan oleh BPK kepada LKPD Jawa Barat selama empat tahun terakhir menjadi indikator keberhasilan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi fiskal. Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa penerapan akuntansi manajemen masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman aparatur terhadap konsep analisis biaya dan efisiensi, keterbatasan dalam integrasi sistem informasi keuangan, serta belum optimalnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pandangan Mardiasmo (2018) dan Mahmudi (2020) bahwa akuntansi manajemen merupakan fondasi penting bagi *good governance* di sektor publik. Sistem akuntansi manajemen tidak hanya berperan dalam pelaporan keuangan, tetapi juga menjadi alat pengendalian dan perencanaan yang membantu pemerintah mengalokasikan sumber daya publik secara efisien dan berorientasi hasil. Melalui penerapan yang konsisten, akuntansi manajemen dapat menjadi jembatan antara tanggung jawab administratif dan tanggung jawab moral pemerintah kepada masyarakat.

Dari hasil temuan dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penerapan akuntansi manajemen tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sistem dan regulasi, tetapi juga oleh faktor manusia, budaya organisasi, dan komitmen pimpinan daerah dalam membangun sistem keuangan yang terbuka dan berintegritas. Dengan demikian, penerapan akuntansi manajemen yang baik akan membawa dampak jangka panjang terhadap peningkatan kepercayaan publik, efisiensi pengeluaran, serta perbaikan tata kelola pemerintahan daerah secara keseluruhan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Aryanto Nur, SE., M.M., M.Ak., Ak., CPA. selaku dosen pembimbing mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1, yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan konstruktif selama proses penelitian hingga penyusunan jurnal ini. Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus ditujukan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan selama penyusunan artikel ilmiah ini.

Ucapan terima kasih ini kami tujukan kepada teman-teman yang telah memberikan dukungan, semangat, serta masukan berharga sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Tidak lupa,

apresiasi juga diberikan kepada semua pihak yang turut berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui bantuan teknis, penyediaan data, maupun saran konstruktif yang memperkaya isi penelitian ini. Semoga segala bentuk dukungan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal

DAFTAR PUSTAKA

1. Agata L. Sandopart, D. P. Y., Sukoharsono, E. G., & Andayani, W. (2023). *Digital Transformation and Management Accounting Practice in Public Sector: Case Study of Local Governments in Indonesia*. *Journal of Public Sector Innovation*, 8(2), 112–129. <https://doi.org/10.21009/jpsi.082.112>
2. Anthony, R. N., & Govindarajan, V. (2011). *Management Control Systems* (12th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
3. Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
4. Fitriani, Y. N., Ramadhani, F., & Syafitri, R. (2024). *Performance-Based Budgeting and Fiscal Efficiency in Indonesian Provincial Governments*. *Indonesian Journal of Accounting and Governance*, 13(1), 45–61. <https://doi.org/10.24843/ijag.2024.13.01>
5. Hansen, D. R., & Mowen, M. M. (2019). *Managerial Accounting: The Cornerstone of Business Decision Making* (8th ed.). Boston: Cengage Learning.
6. Kasmir. (2012). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
7. Mahmudi. (2020). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
8. Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
9. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
10. Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
11. Nurhayani, S. (2022). *Implementation of Management Accounting in Enhancing Financial Accountability in Regional Governments*. *Journal of Public Accounting Review*, 6(3), 210–224. <https://doi.org/10.52975/jpar.v6i3.120>
12. Sabakodi, R., & Andreas, A. (2024). *The Impact of Information Technology on the Effectiveness of Management Accounting in Public Organizations*. *Journal of Accounting and Digital Governance*, 9(1), 87–101. <https://doi.org/10.31002/jadg.v9i1.240>
13. Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach* (7th ed.). Chichester: John Wiley & Sons.
14. Utami, R. P., & Nurayuni, D. (2022). *Public Cost Control and Performance Efficiency in Local Government Finance*. *Journal of Governmental Accounting Research* 7(4), 175–190. <https://doi.org/10.22219/jgar.v7i4.312>
15. World Bank. (2017). *Enhancing Public Sector Transparency and Accountability*. Washington, D.C.: World Bank Publications.
16. Yogatama, D. (2019). *Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Pendekatan Akuntansi Manajemen*. *Jurnal*
17. *Akuntansi dan Kebijakan Publik*, 10(2), 134–150. <https://doi.org/10.20885/jakp.vol10.iss2.art6>